Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak
Volume 2, Nomor 3, Juli 2025
e-ISSN : 3046-8124; p-ISSN : 3046-8817, Hal. 169-183
DOI: https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1256
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/EKSAP

Pengaruh *E-Government* dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

As'syifa Qolbi Maharani[1*], Rindu Rika Gamayuni [2]
[1-2] Univeristas Lampung, Indonesia
assyifaqolbi2410@gmail.com[1], rindu.gamayuni@gmail.com[2]

Alamat: Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung, Lampung 35141
*Korespondensi penulis: assyifaqolbi2410@gmail.com**

Abstract. *The purpose of this research is to determine the influence of e-government and transparency on the quality of local government financial reports. The research method used is quantitative. The partial test results of this study show that e-government has a significant effect on the quality of local government financial reports, while transparency does not have a significant effect on the quality of local government financial reports. The simultaneous test results of this study indicate that e-government and transparency have a significant influence on the quality of local government financial reports.*

Keywords: *E-government, Transparency, Quality of local government financial reports.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh e-government dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil uji parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa e-government berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji simultan dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-government dan transparansi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: *e-government*, transparansi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah memiliki misi pembangunan nasional agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Selain itu, pemerintah juga senantiasa menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai pembangunan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah akan hal tersebut ialah pengoptimalan teknologi informasi. Untuk itulah Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah berharap dengan adanya peraturan yang mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat ikut berkontribusi dalam mencapai pembangunan nasional. Berdasarkan Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden tersebut bahwa salah satu sistem informasi dan teknologi yang dapat mendukung tercapainya praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) adalah dengan pemanfaatan e-government. sejak ditetapkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, mengharuskan setiap organisasi pemerintah, dari lingkup pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah untuk merancang dan mengembangkan, serta

Received: Mei 31, 2025; Revised: Juni 12, 2025; Accepted: Juni 26, 2025; Online Available: Juni 28, 2025

mengimplementasikan konsep e-government, sebagai wadah penyaluran informasi kepada publik. Intinya, penerapan e-government bertujuan untuk meningkatkan transparansi (keterbukaan) informasi seluas-luas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

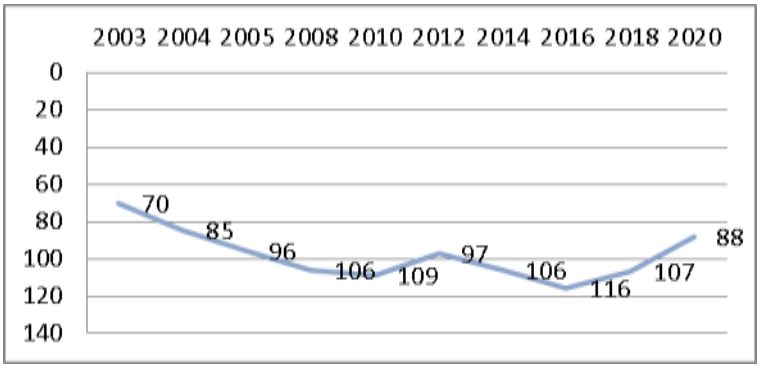

Grafik 1. Peringkat E-government Indonesia di Dunia
(Sumber: Website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

Indonesia menduduki peringkat ke-77 dalam Survei *E-government* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2022 untuk kinerjanya dalam menciptakan dan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menurut laporan Humas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang terkutip di situs web menpan.go.id. Menurut hasil jajak pendapat, Indonesia naik 11 peringkat dari posisi 108 pada tahun 2018 menjadi 88 pada tahun 2020. Dalam Survei *E-government* PBB 2020, Indonesia mencapai total skor 0,6612 dalam kelompok Indeks Perkembangan E-government Tinggi (EGDI), menempatkannya di dalam 100 peringkat teratas dunia di posisi 88 dari 193 negara.

Sektor publik mencakup semua aspek ekonomi yang terkait dengan lembaga dan layanan pemerintah. Dalam periode modern, organisasi sektor publik terlibat dalam memberikan layanan berkualitas tinggi atau memproduksi barang publik bagi masyarakat. Informasi tentang manajemen aset, pendapatan, dan pengeluaran harus dapat diakses atau transparan untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Akibatnya, ketika pemerintah menyajikan informasi mengenai laporan keuangan daerahnya, itu harus terbuka dan jujur.

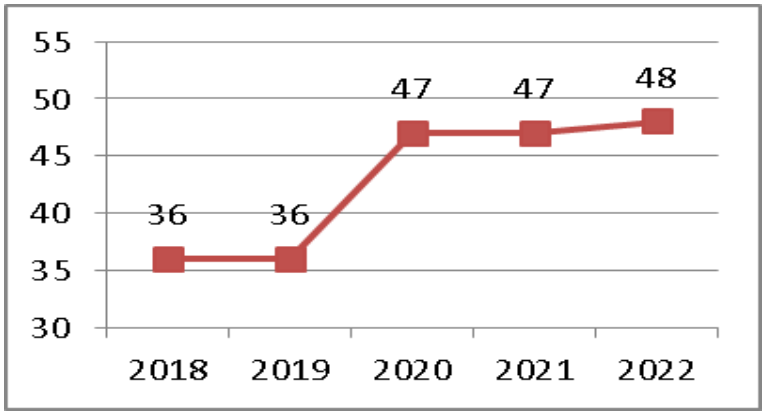

Grafik 2. Perkembangan Skor Pelaksanaan Transparansi Fiskal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari 2018-2022 (Sumber: IHPS Semester I Tahun 2018-2022)

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat kenaikan atas pelaksanaan transparansi fiskal laporan keuangan pemerintah pusat. Peningkatan skor transparansi fiskal laporan keuangan pemerintah pusat mengisyaratkan bahwa pemerintah pusat semakin berusaha terbuka dalam keterbukaan akses informasi mengenai hal yang berkaitan dengan fiskal atau keuangan. Dikarenakan keterbukaan akses informasi oleh pemerintah pusat, hendaknya pemerintah daerah juga dapat mengikuti hal tersebut guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut merupakan grafik mengenai perkembangan mengenai opini audit untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2018-2022.

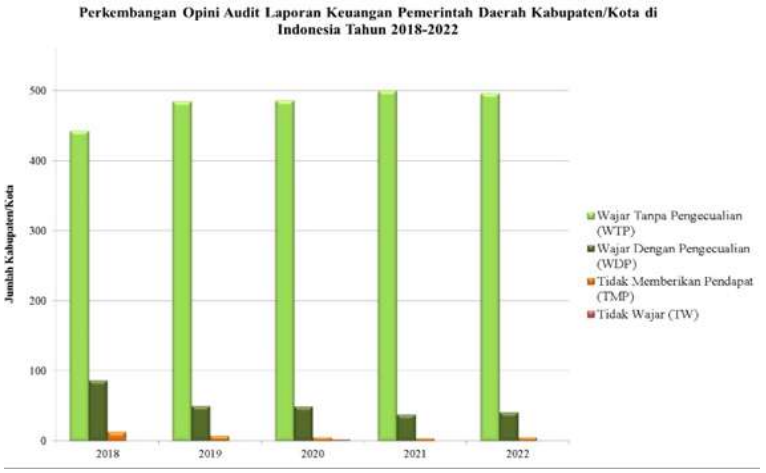

Grafik 3. Perkembangan Opini LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018-2022 (Sumber : IHPS Semester I Tahun 2023)

Selain itu, telah terdapat perbaikan dalam perkembangan opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (kabupaten/kota). Antara tahun 2018 dan 2022, jumlah opini audit yang wajar tanpa pengecualian meningkat. BPK RI terus memberikan laporan keuangan di

sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia dengan opini selain wajar tanpa pengecualian, termasuk opini wajar dengan pengecualian dan opini tidak memberi pendapat. Adanya laporan keuangan dengan opini audit dari BPK RI selain wajar tanpa pengecualian menunjukkan bahwa ada masalah dalam pengelolaan aset, alokasi anggaran, atau penyusunan laporan keuangan. Dalam mengambil keputusan, laporan keuangan berkualitas tinggi sudah pasti akan sangat membantu.(Rompas, F. V., dan Kindangen, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Surya Prayogo & Setiany, 2020 dan Redjo, 2018 mengemukakan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budiawan & Nuryati, 2022, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Temalagi et al., 2022, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Pramita & Dharma, 2018 dan Tullah et al., 2018, menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sutopo et al., 2017, pelaksanaan *e-government* berpengaruh positif terhadap kinerja administrasi pemerintah daerah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Purnomo & Handayani, 2019 serta Wulandari & Bandi, 2015 menyatakan bahwa penerapan dari *e-government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi

Menurut teori keagenan, suatu masalah atau konflik akan terjadi jika terjadi pembagian kekayaan dan kekuasaan antara pemilik yang berperan sebagai prinsipal dan manajer yang berperan sebagai agen yang membantu dalam menjalankan suatu kegiatan organisasi. Hal tersebut dikarenakan masing-masing pihak akan selalu ingin meningkatkan fungsi utilitasnya. Ketika ada dua kepentingan yang bersaing dalam suatu pemerintahan, terjadi asimetri informasi yang mengakibatkan kesulitan keagenan (Abbas et al., 2022).

Teori Legitimasi

Keterikatan organisasi untuk memenuhi harapan publik adalah ukuran dari legitimasinya. Jika sebuah organisasi tidak memenuhi standar ini, maka dianggap tidak sah. Salah satu dampaknya adalah kemungkinan ketidaksetujuan sosial di lingkungan sekitar. Nilai-nilai sosial di sekitarnya harus tercermin dalam tindakan organisasi. Oleh karena itu, untuk

mendapatkan dukungan legitimasi, kegiatan organisasi dan laporannya harus selaras dengan harapan masyarakat.

E-government

E-government merupakan bentuk dari pemerintah disaat menjalankan tugasnya dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat dengan baik dengan menggunakan sarana berbasis internet ataupun teknologi digital lainnya (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018). E-government dapat dikatakan sebagai kumpulan konsep untuk segala bidang yang terkait dengan sektor publik baik pemerintahan pusat maupun daerah dimana pemanfaatan teknologi informasi sangat berkaitan dengan erat. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel (Rohmatun et al., 2022). Aspek interaktif dari e-government memungkinkan warga negara dan birokrat untuk mengirim dan menerima informasi. Dengan memfasilitasi interaksi dua arah, tata kelola elektronik diutamakan sebagai cara untuk meningkatkan penyampaian layanan dan daya tanggap terhadap masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (West, 2004). Menurut Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat menjadi SPBE, merupakan bentuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan nasional oleh pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik.

Transparansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, di dalam kerangka konseptual yang tertera pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa transparansi merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemda mengenai informasi keuangan yang bersifat terbuka dan jujur dimana setiap masyarakat memiliki hak atas akses keterbukaan informasi tersebut. Transparansi publik merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi dari pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Transparansi juga dapat membatasi atau mencegah banyak peluang perilaku korupsi (Bertot et al., 2012).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah adalah ringkasan terorganisir dari situasi keuangan entitas pelapor dan semua transaksinya. Badan pelapor yang dimaksud adalah

lembaga pemerintah yang harus menyediakan laporan akuntabilitas, yaitu laporan keuangan, dan terdiri dari berbagai substansi akuntansi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sistem organisasi dalam pemerintah pusat/daerah, dan organisasi lain. Diwajibkan untuk menyediakan laporan keuangan berdasarkan undang-undang dan peraturan. (Nordiawan, 2012). Salah satu komponen dari proses pelaporan keuangan yang secara metodis menjelaskan status keuangan yang diperoleh dari kegiatan entitas pemerintah daerah adalah laporan keuangan. (Bastian, 2023). Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitas laporan keuangan yang baik dan berkualitas meliputi relevan;andal;dapat dibandingkan;dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan keuangan yang mengandung informasi yang berguna bagi para pengguna, lengkap, terbuka, serta tidak menyesatkan, dan memenuhi karakteristik informasi keuangan seperti relevan, reliabel, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Gamayuni, 2018). Pada saat BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat diartikan bahwa laporan keuangan dari instansi tersebut telah disajikan dan diungkapkan secara wajar juga berkualitas (Yuliani & Agustini, 2016). Opini audit wajar tanpa pengecualian mewakili suatu laporan keuangan berkualitas. Karena dasar auditor memberikan opini ialah ditinjau dari empat karakteritik keuangan, yaitu relevan, reliabel, dapat dipahami, serta dapat dipahami.. Jika suatu laporan keuangan sudah tercantum keempat unsur tersebut, maka auditor akan menilai bahwa laporan keuangan tersebut berkualitas sehingga memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Sehingga kualitas laporan keuangan dapat tercermin dari opini audit. Karena dari opini audit itulah terukur seberapa besar tingkat kepatuhan instansi dalam pelaporan keuangan (Christiaens & Van Peteghem, 2007).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh E-government Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Bandi, 2015, pelaksanaan e-government berpengaruh signifikan positif terhadap pemberian opini audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah yang tentunya memengaruhi kuallitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin efektif pemerintah daerah menggunakan e-government, semakin akurat opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang akan dipengaruhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kedepannya, sudut pandang ini juga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnomo & Handayani, 2019, kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah dipengaruhi secara positif oleh e-government. E-government akan memberikan manfaat bagi pekerja publik dalam semua

laporan keuangan jika dilaksanakan secara konsisten. Ini juga akan menjamin keahlian teknologi yang cukup untuk mendukung secara efektif dan efisien. E-government juga dipercaya mampu meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, serta meningkatkan penyampaian layanan yang efektif, dan memberdayakan pihak publik (dampak sosial) (Sutopo et al., 2017). Ketika ketiga hal tersebut ingin dicapai, maka pemerintah dalam melaporkan pengelolaan keuangannya seharusnya termotivasi untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sembari memanfaatkan e-government sebagai salah satu sistem informasi pemerintah. Teori agensi dapat digunakan dalam menjelaskan penerapan e-government oleh pemerintah. Hal ini disebabkan untuk menghindari terjadinya asimetri informasi antara pihak principal dan agent. Dengan adanya sistem e-government, pemerintah dapat menyebarkan informasi yang perlu diketahui oleh publik sehingga tidak terjadi asimetri informasi. Teori legitimasi dapat digunakan dalam menjelaskan e-government karena sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan e-government tersebut digunakan untuk melayani kepentingan publik. Pelayanan kepentingan publik merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat dalam menjalani tugasnya.

H1 : E-government Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pertukaran informasi yang terbuka adalah landasan transparansi. Semua informasi pemerintahan, institusi, dan prosedur harus tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan dari pemerintah daerah tentu harus dapat diakses agar semua orang dapat membacanya dan belajar lebih banyak. Sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk menyediakan informasi ini. Membuat dan merilis laporan keuangan berkualitas tinggi yang mudah dipahami oleh semua pihak adalah salah satu cara untuk melakukannya (Surya Prayogo & Setiany, 2020). Pemerintah akan berusaha untuk membuat laporan keuangan berkualitas sehubungan dengan tanggung jawabnya untuk menyediakan informasi yang transparan, khususnya mengenai pengelolaan keuangan. Para pemangku kepentingan akan menemukan laporan keuangan berkualitas tinggi ini bermanfaat. Hubungan antara transparansi dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh teori legitimasi. Hal ini dikarenakan pembuatan laporan keuangan berkualitas tinggi merupakan salah satu cara pemerintah memberi jawaban kepada masyarakat. Selain itu,

penelitian yang dilakukan oleh Abbas et al., 2022, dan Wijayanti et al., 2020 menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2 : Transparansi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Periode 2019-2022.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang terdapat pada penelitian kali ini merupakan seluruh kabupaten/kota yang berada di Indonesia selama 4 tahun, dari 2019 sampai dengan 2022. Sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan menentukan beberapa kriteria. Peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data atau informasi terkait dengan data yang didapatkan melalui dokumen yang dapat diakses publik secara tidak langsung. Informasi tersebut dihimpun dari situs resmi masing-masing pemerintahan daerah, website e-ppid BPK RI, website portal satu data yaitu data.go.id, serta website resmi Kemenpanrb.

Pengukuran e-government menggunakan indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Peraturan Peraturan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB Nomor 5 Tahun 2018. Pengukuran transparansi menggunakan 12 dokumen yang tercatat pada Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 188.52/179/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Dokumen tersebut terdiri dari: (1) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, (2) Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, (3) Raperda APBD, (4) Raperda Perubahan APBD, (5) Perda APBD, (6) Perda Perubahan APBD, (7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, (8) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, (9) Laporan Realisasi Anggaran SKPD, (10) Laporan Realisasi Anggaran PPKD, (11) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta (12) Perda dan Opini atas LKPD dengan memberikan nilai masing-masing 1 apabila salah satu dokumen tersedia dan 0 apabila salah satu dokumen tidak tersedia. Pengukuran kualitas LKPD dengan menggunakan opini audit dengan memberikan nilai 4 apabila BPK RI menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian, 3 bila wajar dengan pengecualian, 2 bila tidak menyatakan pendapat , dan 1 bila tidak wajar pada masing-masing LKPD.

Pada penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi berganda serta uji hipotesis melalui aplikasi SPSS 27.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Merupakan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Indonesia periode 2019-2022.	2.036
2.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak mencantumkan nilai indeks SPBE selama 4 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2019 s.d. 2022.	(819)
3.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak mengunggah semua dokumen dari ke-12 dokumen transparansi selama 4 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2019 s.d. 2022.	(28)
4.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak mencantumkan atau menjelaskan terkait opini audit pada laporan keuangan pemerintah daerah selama 4 tahun berturut-turut.	(1)
Jumlah Sampel		**1.188**

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi yang termasuk dalam analisis ini adalah semua kabupaten dan kota di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022.*Purposive sampling* adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memilih sampel. Sampel penelitian diambil dari 1.188 kabupaten dan kota di Indonesia.

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Desciptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-government	1188	1.00	3.84	2.2782	0.61503
Transparansi	1188	1.00	12.00	2.7508	2.42707
KLKPD	1188	2.00	4.00	3.9335	0.27189
Valid N (listwise)	1188				

Sumber: Output SPSS 27 (2025)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, menunjukkan bahwa jumlah data (n) yang diteliti sebanyak 1188. Variabel pertama yaitu *E-government* memiliki nilai minimum sebesar 1.00 yang berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota tersebut memiliki nilai indeks SPBE yang kurang. Sedangkan nilai maksimum yang diperoleh sebesar 3.84 yang berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota tersebut memiliki nilai indeks SPBE yang sangat baik. Nilai rata-rata dari seluruh variabel *e-government* diperoleh hasil sebesar 2.2782 dan dengan standar deviasi sebesar 0.61503.

Variabel kedua yaitu transparansi memiliki nilai minimum sebesar 1.00 yang berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota tersebut hanya mengunggah 1 dokumen saja dari ke 12 dokumen transparansi. Sedangkan nilai maksimum yang diperoleh sebesar 12 yang berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota tersebut mengunggah seluruh 12 dokumen transparansi. Nilai rata-rata dari seluruh variabel transparansi diperoleh hasil sebesar 2.7508 dan dengan standar deviasi sebesar 2.42707.

Variabel ketiga yaitu KLKPD memiliki nilai minimum sebesar 2.00 yang berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota tersebut mendapatkan opini audit disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Sedangkan nilai maksimum yang diperoleh sebesar 4 yang berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota tersebut mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian. Nilai rata-rata dari seluruh variabel KLKPD diperoleh hasil sebesar 3.9335 dan dengan standar deviasi sebesar 0.27189.

Uji Multikoliniearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikoliniearitas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1	*E-government*	0.969	1.032
	Trasnparansi	0.969	1.032
a. Dependent Variable: KLKPD			

Sumber: Output SPSS 27 (2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, tidak ditemukan variabel independen dengan nilai tolerance kurang dari 0.1 atau VIF lebih dari 10. Artinya menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi *Durbin Watson*

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.109[a]	0,12	0,010	0.23872	1.969
a. Predictors: (Constant), Transparansi, *E-government* b. Dependent Variable: KLKPD					

Sumber: Output SPSS 27 (2025)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan Uji Durbin Watson, penelitian ini memperoleh nilai DW sebesar 1.969. Dari tabel Durbin Watson, dengan k = 2 dan n = 1200, diperoleh nilai dU sebesar 1.90344 dan nilai dL sebesar 1.90678. Hal ini berarti bahwa 4 - dU = 2.09656. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa 1,90344 < 1,969 < 2.09656, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada sampel yang digunakan dalam model regresi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	Coefficients[a]					
	Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	(Constant)	3.847	0.027		143.733	0.000
1	*E-government*	0.041	0.011	0,106	3.627	<0,001
	Transparansi	0.001	0.003	0,010	0.327	0,744
a. Dependent Variable: KLKPD						

Sumber: Output SPSS 27 (2025)

Uji Statistik t

Hasil Pengujian Pengaruh *E-government* Terhadap KLKPD

Variabel e-government memiliki nilai signifikansi sebesar < 0.001 dan lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan antara variabel e-government terhadap KLKPD, Hipotesis yang diajukan (H1) diterima.

Hasil Pengujian Pengaruh Transparansi Terhadap KLKPD

Variabel transparansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0.744.dan lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel transparansi terhadap KLKPD Hipotesis yang diajukan (H2) ditolak.

Uji Statistik F

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.085	2	0.403	7.064	< 0.001[b]
	Residual	67.528	1185	0.057		

	Total	68.333	1187			
a. Dependent Varaible: KLKPD						
b. Predictors: (Constant), Transparansi, *E-government*						

Sumber: Output SPSS 27 (2025)

Hasil dari perhitungan Uji F tedapat pada nilai sig dimana nilai sig yang dihasilkan sebesar 0.001 < 0.05 Dapat disimpulkan bahwa variabel *e-government* dan transparansi secara stimultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap KLKPD.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]					
	Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	1	0.117[a]	0.014	0.012	0.27026
a. Predictors: (Constant), Transparansi, *E-government*					
b. Dependent Variable: KLKPD					

Sumber: Output SPSS 27 (2025)

Besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0.012 yang artinya variabel *e-government* dan transparansi mampu menjelaskan variabel KLKPD sebesar 1.2%, sedangkan sisanya sebesar 98.8% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan pada penelitian ini.

Pengaruh *E-government* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa *e-government* terbukti berpengaruh positif dan signifikan 5% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai *e-government* yang dinilai dengan indeks SPBE maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.. Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian Heryana, 2013, Purnomo & Handayani, 2019, Sutopo et al., 2017, Wulandari & Bandi, 2015, yang menyatakan bahwa *e-government* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik nilai *e-government* suatu pemerintah daerah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa transparansi terbukti tidak berpengaruh dan signifikan 5% terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan teori, dimana seharusnya transparansi diterapkan sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian Redjo, 2018 dan Surya Prayogo & Setiany, 2020 yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hipotesis pertama (H1) penelitian diterima, membuktikan bahwa variabel e-government (X1) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Hipotesis kedua (H2) ditolak, membuktika bahwa variabel transparansi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Saran

Peneliti memiliki saran untuk penelitian berikutnya untuk dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menggunakan pengukuran lain dalam pengukuran masing-masing variabel satau variabel lain yang memiliki bukti lebih kuat untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR REFERENSI

Abbas, D. S., Pakpahan, R., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2022). Influence Of Internal Control System Weaknesses And Audit Quality On The Quality Of Local Government Financial Reports In Indonesia With Good Government Governance As Moderating. International Journal of Science, Technology & Management, 3(2), 461–474. https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.463

Alwahidi, M. R., & Darwanis, D. (2019). Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(1), 153. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i1.10806

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022.

Bastian, I. (2023). Public Sector Accounting (1st ed.). Universitas Terbuka.

Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government. Transforming Government: People, Process and Policy, 6(1), 78–91. https://doi.org/10.1108/17506161211214831

Budiawan, F. P., & Nuryati, T. (2022). Understanding the Implementation of Good Government Governance (GGG) on The Quality of Public Services. Journal of

Accounting and Finance Management, 3(3), 105–120. https://doi.org/10.38035/jafm.v3i3.99

Gamayuni, R. R. (2018). Basis Akrual Basis Akrual. In Pusaka Media.

Nordiawan, D. (2012). Akuntansi Pemerintahan. Penerbit Salemba Empat.

Pemerintah Pusat Indonesia. (2003a). Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Pemerintah Pusat Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Pusat Indonesia. (2018). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pemerintah Pusat Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pramita, I. I. G. A. A. P., & Dharma, S. I. D. G. (2018). EFFECT OF APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE, GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND APPARATUS ON QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 6(June), 496–504.

Purnomo, A. Y. P., & Handayani, N. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Good Governance Dan E-Government Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(12), 1–20.

Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 1(4), 431–450. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597

Redjo, P. R. D. (2018). Efek Moderasi Pada Pengaruh Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA), 20(2), 1–18.

Rohmatun, A., Azizah, N., & Najicha, F. U. (2022). Law , Development & Justice Review Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip- Law , Development & Justice Review. Law, Development & Justice Review, 5(3), 237–247.

Rompas, F. V., dan Kindangen, W. D. (2022). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 6(1), 461–468.

Surya Prayogo, I., & Setiany, E. (2020). The Influence of Government Transparency, Implementation of the Government Accounting Standards and Internal Control System on Quality of Financial Statement (A Survey Conducted in the Village Administration Bandung Regency, Indonesia). Scholars Bulletin, 6(7), 174–181. https://doi.org/10.36348/sb.2020.v06i07.001

Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). E-government, audit opinion, and performance of local government administration in Indonesia. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 11(4), 6–22. https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.2

Temalagi, S., Anakotta, F. M., & Siahaya, M. D. (2022). The effect of accountability, transparency and internal control on value for money- based budget performance. 3rd International Seminar on Accounting Society "The Review and Outlook of The Economy after Covid 19 Pandemic," 257–270.

Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Wijaya, N. (2018). PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (GGG) DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Di Jawa Barat dan Banten). Balance Vocation Accounting Journal, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.31000/bvaj.v2i1.975

West, D. M. (2004). E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes. Public Administration Review, 64(1), 15–27.

Wulandari, I., & Bandi, B. (2015). Pengaruh E-Government, Kapabilitas Apip Dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 15(2), 148. https://doi.org/10.20961/jab.v15i2.184

Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. JURNAL BISNIS & EKONOMI, 14(1), 56–64. https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8718